

POLA PENDIDIKAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

Fihris*

Abstract: *This paper is aimed at describing the pattern of education on coastal fishing communities in north coast of Central Java, precisely at the district of Wonokerto-Pekalongan. Theoretically, it attempts to find out the factors of low interest in learning among the northern coastal fishing communities since the crisis in 1998 to the present economic condition that seems more uncertain. As a result, education is an expensive thing and difficult to afford. Therefore, this paper tries to find out suitable solution on the pattern of alternative education for them. This is in accordance with the need of facing the globalization era in which education is a necessity for them to improve their performance and professionalism to meet with the rapid development of technology in order that the community is not left behind and crushed by global competition. To begin with, this paper attempts to look forward to answering how and why the condition of public education is getting worse and what alternative education is appropriate for them so as to improve the level of knowledge and life skills they have.*

ملخص: صورت هذه المقالة طراز التربية في مجتمع الصياد في شاطئ البحر الشمالي جاوة الوسطى (ونوكارتو منطقة بكالونجان). وحاول الكاتب (نظريا) الحصول على أسباب قلة رغبة المجتمع في الحصول على التربية، وهم في أزمة اقتصادية منذ السنة ١٩٩٨ م وحتى الآن لم تتحسن حالتهم. أدت هذه الحالة إلى أن التربية هي شئ غال عندهم وصعب الحصول عليها، ثم البحث عن طراز التربية الاختيارية لهم. ومهما كانت الظروف، فإن التربية - في عصرالعولمة - شئ لابد منها لمجتمع الصياد لترقية جودة عملهم ومهنتهم مسaire بتقدم التقنية، إذا أرادوا أن لا يكونوا مجتمعا متخلفين. بدأت المقالة بالبحث عن الجواب وكيف ولماذا ساءت حالة التربية في هذا المجتمع؟ ما هي نوع التربية المناسبة لهم لتترقى معارفهم ومهاراتهم في الحياة.

Keywords: *Nelayan, Kemiskinan, Pendidikan Alternatif*

* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

PENDAHULUAN

Wilayah Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota dan 17 di antaranya terdapat di wilayah pesisir, yang terdiri atas 426 desa yang terbagi menjadi 331 desa di pantai utara dan 95 desa di pantai selatan. Secara geografis, Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri atas pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Wilayah pantai Jawa Tengah terdapat berbagai potensi sumberdaya kelautan yang sangat bervariasi, baik jenis organisme laut ekonomis penting seperti ikan udang, dan kerang, maupun ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan estuaria.¹

Kondisi geografis ini menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang melimpah. Konsekuensinya, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dan menempati daerah sekitar wilayah pesisir laut dan menggantungkan hidupnya dengan profesi sebagai nelayan. Di antara jumlah nelayan tersebut, kategori nelayan dengan status "nelayan penuh" merupakan jumlah terbesar dibandingkan "nelayan sambilan utama" maupun "nelayan sambilan tambahan" dan jumlah ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.²

Dalam memanfaatkan sumber daya kelautan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni: (1) Belum tersedianya basis data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan, pengawasan dan usaha rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan; (2) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan estuaria sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan (*spawning ground/nursery ground*) ikan dan organisme laut penting lainnya di Kepulauan Karimunjawa, kawasan pantai utara, dan kawasan pantai selatan; (3) Rusaknya sarana budidaya/pertambakan terutama di pantai utara akibat dari sistem budidaya yang selama ini digunakan serta kualitas perairan yang kurang mendukung; (4) Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pesisir/pantai di pantai utara yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, industri maupun pertanian; (5) Menurunnya potensi perikanan di laut Jawa akibat dari penangkapan berlebih, sehingga semakin menurunkan pendapatan nelayan; (6) Kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar program yang terkait dengan masalah kelautan maupun antar daerah; (7) Kurang memadainya sarana prasarana sosial ekonomi

¹ Renstra 2004-8\Narasi\Draf-5\Bab V-(c1) Gabung-Praswil (19-9-2003 myt-c.doc), 2004.

² Dirjen Perikanan Tangkap (2003), Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan

masyarakat pesisir pada kawasan sentra pengembangan pesisir dan Kepulauan Karimunjawa; (8) Belum optimalnya pendayagunaan potensi pengembangan perikanan laut di pantai selatan Jawa Tengah; (9) Rendahnya kemampuan lingkungan dan ekosistem habitat vital untuk mendukung kegiatan budidaya pada kawasan pesisir/pantai dan pulau-pulau kecil; (10) Belum terpadunya perencanaan dan optimalnya pembangunan kawasan Kepulauan Karimunjawa; (11) Terbatasnya perangkat hukum, pedoman pengelolaan dan sarana prasarana pendukung pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan secara lestari dan berkelanjutan; (12) Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai; (13) Kurangnya kegiatan Ristek kelautan dan rendahnya penguasaan iptek kelautan untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan (14) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya.³

Berkaitan dengan poin yang terakhir dapat dijelaskan bahwa sebagian besar nelayan -sekitar 83% di antaranya masih hidup miskin dan berusaha dengan cara tradisional dengan menggunakan armada penangkapan sangat sederhana sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga, jika dilihat dari kepemilikan kapal yang dimiliki nelayan seperti sebuah bentuk Piramida yang menunjukkan sangat melebar di bawah. Kapal tidak bermotor berjumlah 64%, Kapal bermotor tempel 21% sedangkan kapal motor berjumlah hanya 15%. Pendapatan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor sekitar Rp 885.000,00 per tahun (70% dari hasil penangkapan ikan, 30% dari sumber pendapatan lain). Selanjutnya, pendapatan nelayan motor tempel sebesar Rp 1.180.000,00 per tahun (73% dari hasil ikan, 27% dari sumber lain), Nelayan kapal motor berpendapatan Rp 1.918.000,00 per tahun (78% dari usaha ikan, 22% dari sumber lain). Sumber lain berasal dari usaha tani, upah sebagai buruh, usaha pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan lainnya. Kondisi nelayan ini semakin diperparah dengan banyaknya kapal nelayan asing (Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan) yang beroperasi dengan teknologi canggih di perairan Indonesia. Akibatnya, eksistensi nelayan tradisional semakin terdesak sehingga ikan tangkapan dan penghasilan mereka pun semakin berkurang dan nasib nelayan pun semakin terimpit. Kurangnya pengawasan terhadap kapal nelayan asing ini menyebabkan ikan yang ada di perairan Indonesia tercuri kurang lebih 80.000 ton/musim, sementara nelayan tradisional Indonesia hanya mampu menangkap 60.000 ton/musim.⁴ Gambaran tersebut mengindikasikan betapa lemah posisi nelayan dalam kehidupan komunitas kelautan. Apalagi tingkat pendapatan nelayan yang

³ Renstra 2004-8\Narasi\Draf-5\Bab V-(c1) Gabung-Praswil (19-9-2003 myt-c.doc).

⁴ Agus Wariyanto, <http://www.suaramerdeka.com/>

rendah juga berimbas pada rendahnya derajat kesehatan dan mutu pendidikan mereka. Akhirnya, munculah kantong-kantong kemiskinan serta merebaklah patologi sosial kemasyarakatan yang cukup memprihatinkan.

Dengan demikian, jumlah nelayan yang cukup besar yang sebenarnya merupakan suatu potensi yang besar bagi pembangunan perikanan, namun dalam kenyataan saat ini, nelayan umumnya merupakan masyarakat marginal yang seringkali tersisih dari akomodasi kebijakan pemerintah. Sejumlah permasalahan yang terus membelit masyarakat nelayan sampai saat ini belum ditangani secara tuntas, seperti persoalan manajemen usaha yang lemah, adopsi teknologi perikanan yang rendah, kesulitan modal usaha, rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan, rendahnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan sebagainya.

RENDAHNYA PENDIDIKAN DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN.

Sebagaimana urain di atas, kehidupan masyarakat nelayan secara umum dikatakan “memprihatinkan”, baik dari faktor ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hubungan antara kemiskinan, nelayan dan rendahnya pendidikan ini merupakan sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Di satu sisi, kemiskinan masyarakat nelayan telah menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan anak-anaknya pada level pendidikan yang lebih tinggi tetapi di sisi lain, rendahnya pendidikan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melingkupinya. Sebagai sebuah ilustrasi dapat disebutkan di sini bahwa tingkat pendidikan masyarakat perikanan adalah sebagian besar (79.05%) tingkat pendidikan mereka tidak tamat SD, 17.59% tamat SD, 1.90% tamat SLTP, 1.37% tamat SLTA dan hanya 0.03% yang tamat Diploma dan Sarjana. Rendahnya tingkat pendidikan tentu saja sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi, penataan manajemen dan perbaikan perilaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Oka dan Ratna Indrawati Josodipoero, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar atau tidak menyelesaikan sekolah dasar atau hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar. Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan, biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, ijazah dan sebagainya masih

harus dibayarkan. Selain itu, masyarakat miskin juga masih harus membayar biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah tertentu), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya.⁵

Kondisi demikian terjadi pula di beberapa desa sepanjang pesisir utara Kec. Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Mayoritas penduduk di sana adalah masyarakat nelayan miskin yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dari hasil tangkapan ikan secara tradisional. Hasil dari penjualan ikan itu sering tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bahkan harus dibantu oleh isteri mereka dengan berjualan ikan matang kecil-kecilan atau usaha yang lain. Akibat dari kemiskinan yang menjerat kehidupan mereka ini, aspek pendidikan hampir pasti tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Sebagian besar, anak-anak mereka lebih sering perkecimpung dalam pekerjaan orang tuanya daripada pendidikan. Jenjang pendidikan maksimal di kalangan mereka rata-rata adalah SD, bahkan banyak di antara mereka yang *drop out* [DO] dari SD sebelum lulus.

Anak laki-laki mereka setelah lulus SD umumnya diorientasikan menjadi nelayan remaja yang berangkat melaut sejak tengah malam dan pulang siang hari [nelayan gemplo] atau berangkat melaut hingga beberapa minggu bahkan berbulan-bulan. Anak putri mereka apabila tidak segera menikah, ia ikut bekerja sebagai buruh *home industri* batik di beberapa desa tetangga atau ikut membantu ibunya sebagai pedagang ikan matang. Mereka berangkat pagi dan pulang sore, dan ikut mengolah ikan dagangan ibunya hingga waktu malam. Begitulah rutinitas kegiatan yang harus mereka jalani sepanjang hari. Dengan demikian, hampir tidak ada waktu yang cukup bagi mereka untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal.

Konsekuensi dari kondisi demikian ini, pada beberapa desa sepanjang pesisir Kecamatan Wonokerto, lulusan [alumni] SMA apalagi lulusan sarjana termasuk makhluk langka. Kalaupun ada, mereka bukan dari keluarga nelayan, melainkan dari keluarga petani “tuan tanah” atau pedagang batik yang sukses. Sebagai contoh, di desa Sijambe Kec, Wonokerto diketahui hanya ada 6 orang tamatan sarjana yang penduduk asli, dan mereka pun bukan dari kalangan keluarga nelayan melainkan dari keluarga petani tuan tanah dan pedagang batik sukses. Hal yang sama juga terjadi di desa Jambean, Kedong Ombo, Wonokerto dan Tratebang di Kecamatan Wonokerto. Proyek BOS yang digulirkan dari Dinas Pendidikan juga tidak sepenuhnya direspon positif oleh mereka. Menurut pengelola salah satu SMP swasta [SMP Islam Fathul Qayim] di desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto menyatakan bahwa betapa sulitnya mereka melakukan

⁵ Nyoman Oka dan Ratna Indrawati Josodipoero, www.worldbank.org.

rekrutmen siswa dari keluarga nelayan meskipun dijanjikan dengan beasiswa penuh [BOS]. Celakanya, justru yang merespon adalah kalangan keluarga wirausaha dari beberapa desa non-nelayan.⁶

Dari gambaran di atas, bisa diasumsikan bahwa persoalan pendidikan masyarakat nelayan di Kecamatan Wonokerto merupakan persoalan yang kompleks [*complicated*]. Hal ini disebabkan melemahnya partisipasi masyarakat nelayan di Kecamatan Wonokerto di bidang pendidikan bukan saja disebabkan oleh kemiskinan yang menjerat mereka. Tiadanya waktu yang cukup bagi mereka [anak-anak nelayan] untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal karena disibukkan oleh pekerjaan dini, melainkan juga minimnya kesadaran mereka tentang arti pentingnya pendidikan bagi mereka dan anak-anak mereka.

Permasalahan-permasalahan yang terkait langsung dengan problematika pendidikan masyarakat nelayan miskin tersebut dalam kerangka teoretis disebabkan beberapa faktor sebagai berikut.

1. Kapitalisasi Sistem Pendidikan Nasional.

Paradigma kapitalisme pendidikan ini sesungguhnya semakin memperburuk situasi masyarakat nelayan. Mereka semakin tidak mampu untuk bersaing dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Paradigma ini tentu saja berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang mencanangkan gerakan wajib belajar 9 tahun. Sebagaimana diketahui, gerakan wajib belajar 9 tahun ini merupakan gerakan pendidikan nasional yang baru dicanangkan oleh pemerintahan Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005. Namun, karena terjadi krisis pada tahun 1997-1999, program ini diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran program ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP No.7/2005 adalah dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dan jumlah penduduk kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada tahun 2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada tahun 2009. Sedangkan target Direktorat SMP, Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK SMP baru mencapai 85,22% yang menunjukkan adanya selisih 9,78% dari target 95% sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan rerata APK sebesar 3,26% pada

⁶ Wawancara dengan Busyairi, HD., Tokoh Masyarakat yang Sekaligus Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam FQ Wonokerto, tanggal 23 Oktober 2012.

setiap tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13-15 tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ Sederajat.⁷

Berkaitan dengan pencapaian APK dan APM, hingga tahun 2003 secara nasional ketercapaiannya ternyata masih rendah. Hal ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan (usia 7-15) sekurang-kurangnya 693.700 orang atau 1,7%, (2) anak putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun (Pusat Data dan Informasi Depdiknas, 2003). Namun, baru-baru ini pemerintah menyatakan optimismenya bahwa penuntasan wajib belajar akan berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini didasarkan atas indikator pencapaian APM SD dan APK SMP pada akhir 2006 berturut-turut mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 95 persen target yang dicanangkan pada 2008.⁸

Kondisi ini sebenarnya belum menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyelesaikan problematika aksesibilitas pendidikan secara tuntas, karena indikator angka-angka di atas belum merepresentasikan aksesibilitas terhadap seluruh warga negara usia sekolah SD dan SMP. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13-15 tahun mencapai 83,49 persen, dan anak umur 16-18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 2004, yang kemudian dipublikasikan dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006, juga memperlihatkan gejala serupa. Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf.⁹

Dengan kapitalisasi pendidikan ini, maka dualisme kaya-miskin menjadi tak terhindarkan. Dalam kerangka dualisme ini, pendidikan seakan-akan menjadi hak orang kaya dan mimpi bagi orang miskin. Kondisi semacam ini telah menarik perhatian Paulo Freire untuk mengkritisnya. Menurut Freire, setiap penindasan apapun bentuknya dinilai tidak manusiawi (*dehumanisasi*) dan karenanya proses pendidikan harus memuat agenda untuk memanusiation manusia (*humanisasi*). Tanpa proses pendidikan yang lebih humanistik, masyarakat yang tertindas hanya akan semakin tenggelam dalam "kebudayaan bisu" (*sub merged in the culture silence*), yaitu suatu kondisi yang senantiasa dalam ketakutan dan ketidakberdayaan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya sendiri

⁷ Panduan KKN Wajar Dikdas. 9 Tahun, UPI 2006

⁸ 8/3/2007, www.tempointeraktif.com.

⁹ www.republikaonline.com.

(Mansour Fakhri, 2001). Freire menggarisbawahi bahwa pendidikan harus bertujuan membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut atau tertekan akibat otoritas kekuasaan.

2. Keterbatasan Anggaran.

Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah, bahkan skenario yang diterapkan pun masih mengalokasikan dana pendidikan dari APBN/APBD dalam jumlah yang terbatas yaitu Total Belanja Pemerintah Pusat menurut APBN 2006 adalah sebesar Rp 427,6 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dianggarkan untuk pendidikan adalah sebesar Rp36,7 triliun. Asumsi kebutuhan budget anggaran pendidikan adalah 20% dari Rp 427,6 triliun atau sebesar Rp. 85,5 triliun sehingga masih terdapat defisit atau kekurangan kebutuhan dana pendidikan sebesar Rp 47,9 triliun. Skenario progresif pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu hanya menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 % pada tahun 2005 dan 9,1 % pada tahun 2006.¹⁰

Pada tahun 2007 lalu, anggaran sektor pendidikan hanya mencapai 11,8 persen. Nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun.¹¹ Permasalahan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah untuk berupaya merealisasikan anggaran pendidikan 20% secara bertahap karena pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan 20% secara sekaligus dari APBN/APBD. Padahal, kekayaan sumber daya alam baik yang berupa hayati, sumber energi, maupun barang tambang jumlahnya melimpah sangat besar. Akan tetapi, karena selama ini penanganannya secara kapitalistik maka *return* dari kekayaan tersebut malah dirampas oleh para pemilik modal.

3. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada Masyarakat dan Potensi Daerah

Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 tentang Kurikulum menyebutkan: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan

¹⁰ Pan Mohamad Faiz;2006.

¹¹ www.tempointeraktif.com.

pendidikan nasional; (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik; (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan (a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (h) agama (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam pasal 6 disebutkan:1) kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan; 6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian yang terintegrasi dengan siswa sebagai peserta didik. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peran keluarga, lingkungan-masyarakat dan sekolah sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi keberlangsungan (kontinuitas) pendidikan itu sendiri.¹²

NELAYAN DAN JERAT KEMISKINAN.

Setiap manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang harus ia penuhi dalam hidupnya. Salah satu teori yang cukup populer di kalangan ahli psikologi adalah teori hierarki kebutuhan (*need-hierarchy theory*) yang dikemukakan Abraham H. Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling tinggi. Kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi tidak mungkin timbul sebelum kebutuhan yang mendasar terpenuhi. *Pertama*, kebutuhan fisiologis. *Kedua*, kebutuhan akan rasa aman. *Ketiga*, kebutuhan akan rasa kasih sayang. *Keempat*, kebutuhan akan harga diri dan *Kelima*, kebutuhan

¹² Handayani, <http://ayok.wordpress.com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-gagasan-based-syaria-education/>.

akan aktualisasi diri. Bagi kaum duafa, fakir, dan miskin, pemenuhan kebutuhan mereka tidak sampai ke tingkatan kebutuhan yang tertinggi seperti yang diungkapkan Maslow. Bahkan, mereka masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun yaitu makan, minum, dan tempat tinggal.¹³

Bagi negara-negara berkembang, masalah kemiskinan merupakan fenomena yang mewarnai sebagian besar masyarakatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, mencatat sekitar 150 juta anak di dunia menderita kekurangan gizi, mengalami kemiskinan, eksploitasi, dan kekurangan pendidikan. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin (yang berpenghasilan kurang dari dua dollar AS per hari menurut standar Bank Dunia) mencapai 60 persen (*kemiskinan relatif*). Bahkan, disebutkan sekitar 10-20 persen dari kelompok ini hidup dalam *kemiskinan absolut* (kekurangan makan, pakaian, perumahan, kebutuhan air bersih, pendidikan, kesehatan, listrik, dan transportasi). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah kemiskinan absolut dari sekitar 24,23 persen (1998) menjadi sekitar 18,95 persen dari jumlah penduduk Indonesia akhir tahun 2000.¹⁴ Bahkan, menurut Tresna P. Soemardi, berdasarkan laporan Bank Dunia, penduduk miskin Indonesia - dengan menggunakan indikator kemiskinan moderat, yakni pendapatan kurang dari dua dolar AS per hari - mencapai 49 persen atau separuh total jumlah penduduk. Sementara itu, dilihat dari sudut sebaran wilayah, angka kemiskinan di perkotaan sekitar 39 persen dan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 53 persen.¹⁵

Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor individu yang lemah, baik secara fisik (misalnya cacat fisik), mental (misalnya kurang akal), ilmu (kurang berpendidikan), kepribadian (pemalas) ataupun kapital (tidak punya modal). *Kedua*, faktor kontrol sosial. Orang bisa miskin, bahkan suatu kaum bisa miskin karena adat istiadat, budaya atau kepercayaannya. Pada suatu masyarakat yang percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan dan ikhtiar itu tidak perlu (paham *Jabariyah*), akan sangat sulit untuk mengubah kondisi miskin mereka menjadi lebih baik. Pada masyarakat lain, pengutamaan keharmonisan dan kemapanan sehingga menolak kreativitas baru dalam teknologi juga menjadi hambatan. Sebaliknya, kontrol sosial ini akan sangat positif bagi masyarakat yang sangat menghargai waktu atau kreativitas. Di tengah-tengah masyarakat yang demikian, orang-orang pemalas tidak akan punya tempat, sehingga mereka terpacu untuk produktif dan kreatif.

¹³ (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>).

¹⁴ Muttaqin, <http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=28,20/10/2003>).

¹⁵ Tresna P. Soemardi, *Separuh Rakyat Indonesia Masuk Kategori Miskin*, <http://www.antara.co.id/arc/2007/3/22/guru-besar-ui-separuh-rakyat-indonesia-masuk-kategori-miskin/>

Jadi, kontrol sosial lahir sebagai akibat dari suatu pemikiran dan perasaan yang berkembang di masyarakat.

Ketiga, faktor sistem yang berlaku pada suatu negara. Pada suatu negara yang sistemnya tidak mendukung, maka individu-individu cerdas yang bekerja keras, dan kontrol sosial yang mampu menciptakan iklim produktivitas yang tinggi menjadi tidak berguna. Beberapa tahun silam pernah terjadi ribuan petani cengkeh tiba-tiba miskin mendadak, lantaran peraturan tata niaga cengkeh dari pemerintah yang timpang. Di masa krisis moneter, ribuan perusahaan, termasuk bank-bank besar, bangkrut sebab penghasilannya tetap rupiah sementara cicilan hutang mereka dalam dolar AS yang melambung nilainya.

Karena itu, negara mempunyai peranan penting, baik pada tingkat individu maupun sosial. Pada level individu, negara harus intervensi manakala perintah mencari nafkah atau kewajiban memberi nafkah tidak dijalankan. Khalifah Umar pernah mengusir sejumlah pemuda yang hanya bermalas-malasan di masjid (tidak bekerja), meski mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang tawakal. Khalifah pula yang akan memaksa orang-orang yang enggan membayar zakat, karena ini berarti merampas hak-hak fakir miskin. Pada level masyarakat, negara memiliki otoritas untuk mengarahkan agar kontrol sosial tumbuh sehat. Misalnya, melalui media massa, dengan mempropagandakan budaya kerja keras, produktivitas dan kreativitas, dan bukan budaya hedonis yang konsumtif.

Keempat, krisis kapitalisme global.¹⁶ Para ekonom Kapitalis, terutama yang beraliran neo-klasik berpendapat bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi melalui *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah). Mereka berargumen bahwa peningkatan kekayaan para investor yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah. Bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut misalnya upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang memecahkan permasalahan kemiskinan dalam Kapitalisme.

Dalam menjelaskan fenomena kemiskinan nelayan akan lebih relevan menggunakan teori-teori radikal. Secara teoretis dan empiris, problem kemiskinan nelayan disebabkan oleh kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun subsektor perikanan. *Pertama*, secara empiris, Tinjabate (2001) membuktikan bahwa akibat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam pembangunan perikanan, yakni merealisasi kepentingan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, Intervensi birokrasi

¹⁶ Hiariej Eric, *Krisis Kapitalisme Global*, Kompas 8/4/02.

dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan berlangsung secara intensif. Implikasinya adalah kepentingan-kepentingan nelayan tradisional terabaikan akibat perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah Kabupaten Poso. *Kedua*, ketergantungan yang berbentuk hubungan *patron-client* antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dengan buruh nelayan. Penelitian Nasikun bersama rekan-rekannya tahun 1996 di daerah Muncar, Jawa Timur, Elfiandri tahun 2002 di pantai barat, Sumatera Barat dan Iwan tahun 2002 di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten Tajung Jabung, Jambi mengungkapkan kesimpulan yang substansinya sama bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan di daerah ini menyebabkan kelompok nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret dalam kemiskinan.¹⁷

POLA PENDIDIKAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT NELAYAN

Persoalan penduduk miskin dengan jumlah yang relatif tinggi, khususnya di wilayah pedesaan nelayan, membawa dampak terhadap banyaknya anak-anak nelayan yang putus sekolah, karena persoalan ekonomi. Menurut Data Depdiknas (Kompas, 20 Juli 2002), anak yang tidak tertampung di sekolah berjumlah 12 juta. Penyebab putus sekolah itu sebagian besar berlatar belakang persoalan ekonomi, sehingga anak-anak putus sekolah pada akhirnya masuk ke pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 1999, jumlah pekerja anak berusia 10-19 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi/bekerja mencapai 6,7 juta orang. Anak-anak dari kelompok miskin dihadapkan pada situasi dilematis ketika ia harus meninggalkan bangku sekolah dan meneruskan hidupnya dengan bekerja. Dalam kondisi demikian, sangat sulit bagi anak dari kelompok miskin untuk beradaptasi dengan sistem sekolah formal. Artinya, secara sosial maupun ekonomi, tidak mungkin anak tersebut dapat memaksimalkan aktualisasi dirinya melalui sekolah formal.

Bagi anak-anak miskin, sistem pendidikan sekolah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil yang mereka hadapi sehari-hari. Dari segi kebutuhan, materi yang diajarkan sangat abstrak serta proyeksi pendidikan yang linier sangat sulit untuk diakses dan diadaptasi kelompok ini sehingga materi pendidikan yang abstrak itu tidak dapat dielaborasi lebih lanjut di masa mendatang dan justru menjadi beban dalam proses belajar di tingkat pendidikan dasar, bahkan *incompatible* dengan kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari.

¹⁷ Karim, www.sinarharapan.co.id/berita/0308/20/opi01.html - 30k.

Selain itu, karena keseharian mereka sudah dipenuhi aktivitas mencari nafkah, sistem sekolah juga menjadi tidak adaptif terhadap mereka, terutama dari segi waktu belajar di sekolah dan persiapan belajar di rumah. Dengan model pendidikan sekolah, anak-anak miskin tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan nilai, peringkat, ataupun memasuki sekolah-sekolah unggulan. Sudah menjadi *trend* tersendiri untuk meningkatkan kualitas belajar dengan mengikuti les, kursus, atau bimbingan belajar dan sebagainya yang saat ini telah menjadi salah satu lapangan tersendiri dalam bisnis pendidikan. Bagi masyarakat miskin, model persaingan seperti ini tentu jauh dari jangkauan.

Bagi anak miskin, yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan potensi mereka yang hanya mampu mengenyam pendidikan dasar atau malah kurang dari itu. Anak-anak harus belajar mengajukan pertanyaan sendiri secara kreatif dengan benar sesuai dengan permasalahannya dari pada menjawab pertanyaan orang/guru secara benar tapi tidak mengerti makna dari pertanyaan itu yang lebih mengandalkan hafalan.¹⁸ Bagi anak-anak miskin, mempelajari kegunaan dan mengelola kotoran ayam atau sapi, serta membedakan kegunaan kertas koran bekas, kardus dan plastik bekas yang dilakukan para pemulung akan jauh lebih bermanfaat dari pada belajar tentang pakaian adat daerah lain atau mikroskop.

Menurut Romo Mangunwijaya, model sekolah tidak cocok bagi masyarakat miskin. Karena itu, perlu dirumuskan model pendidikan alternatif yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi nelayan. Ia kemudian menawarkan beberapa pandangan berikut. *Pertama*, bagi masyarakat miskin, model pembelajaran lebih ideal menggunakan paradigma pendidikan "pemerdekaan". Model pendidikan ini harus menjadikan mereka sebagai manusia kritis dan memiliki kemampuan *survive* di tengah arus kapitalisasi pendidikan dan dunia kerja; yaitu dengan membekali kaum miskin dengan keterampilan sosial dan kecerdasan psikomotorik agar mereka bisa bekerja mandiri. *Kedua*, pemerintah harus harus "legowo" untuk membantu proses legalisasi sekolah-sekolah alternatif yang diselenggarakan komponen masyarakat sipil, mengalokasikan anggaran negara untuk mensubsidi dan memproteksi sekolah untuk kaum miskin tersebut. *Ketiga*, komponen masyarakat sipil, yaitu agamawan, LSM, media, dan sebagainya harus penuh inisiatif untuk menghadirkan program pendidikan alternatif di setiap ruang publik bagi masyarakat miskin sebagai bentuk investasi penyadaran sosial generasi bangsa di masa depan.¹⁹

¹⁸ Y.B. Mangunwijaya, *Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat*, (Jogjakarta Kanisius, 1999).

¹⁹ (Prasetyaningsih, <http://www.mail-archive.com/tionghoa-net@yahoogroups.com/msg03191.html>).

Senada dengan pendapat Romo Mangunwijaya, Tresna P. Soemardi mengatakan bahwa model pendidikan alternatif tersebut dapat berupa pendidikan kejuruan gratis yang relevan dengan komoditas potensial di desa miskin. Ia memaparkan bahwa paradigma pendidikan di desa miskin seharusnya tidak diarahkan pada pendidikan umum yang berorientasi perguruan tinggi tetapi lebih kepada pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan atau mengusahakan sumber daya di lingkungannya.²⁰

PENUTUP

Dewasa ini, ada berbagai bentuk pendidikan alternatif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat baik perorangan maupun secara kelompok melalui LSM-LSM, seperti “laboratorium edukasi dasar” oleh Romo Mangun dan Kelompoknya “Sekolah Tanpa Dinding” ataupun “Sekolah Darurat Kartini” di Kolong Jembatan tol Rawa Bebek dan Kolong Tol Jembatan Tiga Jakarta oleh si kembar Ryan dan Rossi atau (ibu kembar) yang mengorganisir dan membelajarkan ratusan anak-anak miskin, terlantar yang hidup di jalanan, di pembuangan akhir sampah maupun di perkampungan kumuh. Sekolah yang katanya memiliki atap termahal di Indonesia bahkan Dunia karena terbuat dari beton tebal dan panjang itu menampung puluhan bahkan ratusan anak-anak miskin, yang belajar membaca, menulis, berhitung (calistung) dan bernyanyi gembira dengan penuh semangat walaupun tanpa meja dan kursi.

Secara yuridis, model pendidikan alternatif ini sudah memiliki landasan hukumnya, sebab menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 27 ayat 1 disebutkan, “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Ayat 2 menyebutkan, “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Melalui payung hukum itu, mereka yang belajar di rumah sudah memiliki legalitas dalam sistem pembelajaran mereka.

Secara historis, bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) ini sebenarnya telah dikenal sejak lama. RA Kartini, misalnya, memulai pendidikan kepada kaum perempuan di luar sekolah dengan materi pendidikan selain baca-tulis, juga keterampilan yang dibutuhkan kaum perempuan saat itu. Ki Hajar Dewantara bahkan secara keras menentang stigmatisasi pemerintah kolonial Belanda terhadap sekolah-sekolah pergerakan

²⁰ Tresna P. Soemardi, [http://www .antara.co.id/arc/2007/3/22/ guru-besar-ui- separuh-rakyat- indonesia-masuk-kategori-miskin/](http://www.antara.co.id/arc/2007/3/22/guru-besar-ui-separuh-rakyat-indonesia-masuk-kategori-miskin/).

yang dicap sebagai sekolah liar. Karena itu, dia membangun Taman Siswa sebagai suatu proses belajar bersama kaum pribumi yang saat itu tidak bisa mengakses pendidikan formal, dengan mengembangkan nilai-nilai nasionalisme anti penjajahan yang dibutuhkan masyarakat terjajah pada saat itu.

Model-model pendidikan alternatif yang berkembang dewasa ini pada hakikatnya ingin mengembalikan makna belajar pada pemikiran yang asasi, sebab belajar pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Proses belajar bagi anak (manusia) sebetulnya tidak dibatasi hanya oleh institusi sekolah. Sejak dilahirkan, anak mengalami proses belajar bersama dengan lingkungannya. Institusi sekolah seharusnya berfungsi sebagai sarana atau alat dalam proses belajar. Namun, dalam kenyataan, sekolah justru mendominasi gagasan tentang pendidikan bagi masyarakat. Gagasan dan praktik sekolah tersebut telah melahirkan ketidaksetaraan (*inequality*) ketika tidak semua orang bisa mengakses pendidikan sekolah.

Namun, ketika sistem sekolah sebagai sarana belajar diperkenalkan, belajar seolah-olah menjadi kegiatan atau proses yang terpisah dengan kehidupan seseorang. Ketika sekolah telah diterima menjadi pemegang kebenaran dominan tentang proses belajar maka proses belajar di luar institusi itu memiliki nilai negatif. Kebutuhan manusia bukan lagi atas proses belajarnya, melainkan direduksi menjadi kebutuhan atas sekolah. Manusia yang tidak dapat terlibat dalam institusi sekolah mendapat nilai yang negatif. Ketidakmampuan segolongan orang (kaum miskin) untuk mengakses pendidikan ini disebut Ivan Illich²¹ sebagai kemiskinan modern, yaitu kemiskinan yang muncul akibat ketergantungan masyarakat terhadap institusi-institusi masyarakat (misalnya sekolah, rumah sakit, dan kebudayaan) dan ketidakmampuan mereka untuk mengakses institusi tersebut.

Ada beberapa kelebihan dari model-model pendidikan alternatif ini. *Pertama*, ia menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai sarana dan materi belajar. Model pendidikan ini berbeda dengan sistem sekolah yang memberikan materi abstrak yang menjadi beban bagi sang murid. Model pendidikan ini menggunakan pengalaman nyata sebagai alat refleksi sehingga anak tanpa banyak kesulitan dapat mengambil contoh, melakukan kritik, berdialog secara demokratis dan membangun suatu pemahaman baru. Misalnya, pengamen anak dapat menggunakan pekerjaannya, keluarga, dan lingkungannya sebagai inspirasi lagu, dan dapat menggunakan lagu yang mereka temukan untuk mencari nafkah. *Kedua*, model pendidikan ini tidak mensyaratkan guru dengan kualifikasi

²¹ Ivan Illich, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1982).

tertentu, kecuali kesabaran dan sikap kritis karena guru adalah sekaligus murid, yang memperoleh materi belajar bukan dari kurikulum (yang dalam sekolah formal sering abstrak bahkan bagi sang guru), melainkan dari proses belajar yang terjadi. *Ketiga*, model pendidikan ini menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi si murid, tidak dibakukan pada jam reguler selayaknya sistem sekolah. Sehingga anak tetap dapat melakukan aktivitasnya mencari nafkah. *Keempat*, yang paling penting, model pendidikan ini dibangun dari kebutuhan si anak dan komunitasnya. Dengan demikian,, selain sebagai sarana belajar, ia juga membantu anak dan komunitasnya menjawab problem-problem nyata sehari-hari. Misalnya, bagaimana anak dan komunitas menghadapi banjir, bagaimana mengamen yang aman, bagaimana cara menjual koran yang efektif, dan lain sebagainya. *Kelima*, tentu saja biaya pendidikan model ini tidak membebani si murid, sebab model pendidikan alternatif ini tidak dituntut menggunakan sarana seperti buku-buku yang mahal. Selain itu, model pendidikan ini biasanya dilandasi satu moral aktivitas kemanusiaan sehingga pesertanya tidak dipungut bayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Tim and Alan Thomas, *Poverty and Development Into the Twenty First Century*, Oxford UP, 2000.
- Depdiknas, *Model Pendidikan Luar Sekolah Bagi Pekerja Anak*, Jakarta: Depdiknas, 2000.
- Dahuri, Rokhmin, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB), 2000.
- _____, *Keanekaragaman Hayati Laut*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- _____, "Membangun Indonesia yang Maju, Makmur, dan Mandiri Melalui Pembangunan Kemaritiman". *Makalah Temu Nasional Visi, Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik*, Jakarta tahun 2004.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan*, 2003.
- Evert, Reimer, *Matinya Sekolah*, Jakarta: Hanindita Graha Media, 2000.
- Fakih, Mansour, *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Freire, Paulo, "Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan", dalam *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & READ, 2002.
- _____, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____, *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- _____, *Sekolah. Kapitalisme Licik*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Illick, Ivan. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.
- Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Klinken, Helene Van, *Pendidikan Bagi Semua? Eksperimen dalam Pendidikan Alternatif di Indonesia*, Salatiga: Bina Darma, 1991.
- Muttaqin, Hidayatullah. Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan. <http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=28,20/10/2003>
- Mangunwijaya, Y.B. *Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat*, Jogjakarta: Kanisius, 1999.
- Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- _____, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2001,
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Oka, Nyoman dan Ratna Indrawati Josodipoero. Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. dalam [http:// www.worldbank.org](http://www.worldbank.org))
- Prasetyaningsih, Yuli dan Ari Kristianawati. "Sekolah Bukan untuk Rakyat Miskin?". dalam <http://www.mail.archive.com/tionghoanet@yahoogroups.com/msg03191.html>
- Penny, D.H, *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.